

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Title	Perspektif Kerjasama Keamanan Dalam Hubungan Malaysia – Indonesia
Source	http://phuakl.tripod.com/pssm/conference/day312.doc
Author 1	Ayu Yudiati
Author 2	NA
Author 3	NA
Publication/Conference	4th International Malaysian Studies Conference; 3-5 August 2004, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
Edition	NA
Document Type	Article
CPI Primary Subject	Foreign Relations and Treaties
CPI Secondary Subject	; ; ;
Geographic Terms	Malaysia; Others
Abstract	This paper elaborate the peace keeping cooperation between Malaysia and Indonesia. Article written in Malay.

Centre for Policy Initiatives (CPI)

Pusat Iniatif Polisi

政策倡议中心

<http://www.cpiasia.org>

PERSPEKTIF KERJASAMA KEAMANAN DALAM HUBUNGAN MALAYSIA – INDONESIA

Oleh:

DR. Hj. R. Ayu Kundewi Yudiati, MSi.

Pengantar

Sebagai dua negara yang bertetangga, yang berbatasan baik darat maupun laut, serta perbatasan social-budaya yang begitu erat, Malaysia dan Indonesia tidak dapat mengabaikan hubungan satu dengan lainnya. Meski tidak kentara, sebenarnya kedua negara selalu memprioritaskan hubungannya. Sebagai negara yang berdekatan secara geografis dan serumpun akar sosial-budaya, justru sering mengalami pasang-surut dalam hubungan bilateral.

Banyak faktor yang melatarbelakangi hubungan kedua negara, baik mengenai persaingan kepemimpinan, masalah tintas-batas antara kedua penduduk, sengketa dan klaim kepemilikan wilayah, pencurian kayu, buruh migran Indonesia, terorisme, kejahatan transnasional, sampai pada masalah asap. Namun disamping perbedaan pandangan tentang factor-faktor tersebut di atas, ada beberapa kesamaan strategi antara keduanya untuk mengamankan kawasan dari berbagai ancamannya. Meskipun dewasa ini ada sedikit kemunduran dalam kerjasama keamanan antara keduanya, tetapi perlu kembali diingatkan akan pentingnya kerjasama bidang ini menghadapi perubahan lingkungan yang sukar diprediksikan.

Bagi kedua negara berbatasan ini, kerjasama bidang pertahanan dapat diprioritaskan agar dapat tercapai pembangunan nasional masing-masing. Bagi Indonesia khususnya, karena adanya pesan konstitusi, bahwa peran serta aktif Indonesia dalam mewujudkan dan melihara perdamaian dan ketertiban dunia. Kerjasama pertahanan dengan Malaysia misalnya untuk mengatasi ancaman terorisme dan kejahatan lintas negara. Hal ini juga merupakan keselarasan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sehingga dalam masalah ini harus ada apa yang disebut “*convidence building measure*” atau membangun rasa saling percaya. Indonesia dan Malaysia perlu mengembangkan prinsip saling percaya dan menghormati hak kedaulatan masing-masing negara dan tidak saling mengintervensi urusan internal masing-masing negara. Hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Hanya saja terlihat indikasi adanya “perlombaan senjata”.

Bagaimana Indonesia dan Malaysia perlu menyusun Buku Putih (*White Paper*) mengenai pertahanan masing-masing?

Krisis Ekonomi

Ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara, Malaysia dan RI terkena imbasanya dan kedua negara tidak dapat saling menolong karena krisis ini membawa dampak buruk bagi

perekonomian kedua negara. Masing-masing pemerintahan kemudian berusaha untuk mencari solusinya sendiri. RI mengadopsi kebijakan dari IMF untuk penyembuhan ekonominya, sementara Malaysia mencari penyelesaiannya sendiri yang lebih percaya diri untuk tidak bergantung pada pihak asing. Dari persepsi ini seolah kedua negara berbeda pandangan, khususnya dalam melibatkan pihak asing dan tidak melibatkannya dalam proses perbaikan ekonominya.

Upaya kedua pemerintah tersebut menghasilkan buah yang kontras, Indonesia terus berkepanjangan dilanda krisis ekonomi dan terjadi reformasi di bidang politik, sementara Malaysia terus maju dalam pertumbuhan ekonomi dengan politik yang relatif stabil. Pemerintahan rezim Soeharto jatuh karena tuntutan reformasi. Demikian pula pemerintahan masa transisi di bawah B.J. Habibie dan pemerintahan berikutnya di bawah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang jatuh di tengah jalan. Sementara Malaysia tetap berada di bawah kepemimpinan PM Mahathir Mohamad sampai beberapa tahun ke depan.

Kepemimpinan di ASEAN

Kedua negara memang berbeda persepsi dalam menghadapi persoalan internal, dan masalah ini terbawa ke forum regional seperti halnya ASEAN. Terbukti bahwa tokoh-tokoh reformis Indonesia lebih menekankan pada “*inward looking policy*” yang berbeda kontras dari pemerintahan Indonesia sebelumnya. Hal ini menyebabkan kurang berperan Indonesia di ASEAN yang sebelumnya merupakan fokus politik luar negeri Indonesia, Sementara itu, Malaysia di bawah kepemimpinan PM Mahathir Mohamad semakin memposisikan kebijakan eksternalnya yang konfrontatif terhadap lingkungannya. Tak heran bila AD, Australia atau negara Barat lainnya yang menjadi gusat, bahkan marah. Dalam kerjasama regional pun Mahathir menonjol, dan disegani.

Posisi Malaysia sepertinya mengambil kedudukan Indonesia sebelumnya. Kini Malaysia dikenal sebagai “pemimpin kawasan”. Dari perspektif ini akan ada pengaruhnya pada hubungan dan kerjasama keamanan (*security cooperation*) antara kedua negara

Kerjasama Keamanan Malaysia – Indonesia

Kerjasama di bidang keamanan antara Malaysia dan Indonesia telah dilakukan melalui “*security Agreement*”, sejak tahun 1972. Melalui persetujuan ini dibentuk apa yang dinamakan Komite Perbatasan, yang menangani masalah-masalah keamanan di wilayah perbatasan kedua negara, antara lain:

- Perompakan/pembajakan dan penyelundupan
- Perambahan hutan secara illegal
- Penggeseran patok-patok perbatasan; dan
- Masalah lintas batas.

Kerjasama dalam bentuk latihan militer (*military exercise*) telah banyak dilakukan

secara periodik maupun temporer bergantung situasi dan kondisi, seperti KEKAR MALINDO, MALINDOJAYA, ELANG MALINDO, dan DARSASA.

Dalam konteks kerjasama keamanan ini, juga mensinergikan perkembangan industri strategis melalui kemitraan tiga pilar ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), yaitu: (1) Industri; (2) Perguruan Tinggi; dan (3) Industri Pertahanan. Dalam hal ini bentuk kerjasama yang dilakukan meliputi:

- Kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, informatika, dan industri lainnya.
- Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang *design* dan *engineering*, meliputi keahlian dan kemampuan pengembangan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, system senjata, system jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta system informasi.
- Kerjasama dalam memberdayakan industri nasional dalam rangka menciptakan kemandirian, memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain.
- Kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan alat pertahanan lainnya.
- Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertahanan, baik yang berkaitan dengan teknologi, manajemen maupun SDM.

Kontradiksi dalam Kerjasama Keamanan

Bila kedua negara sebelumnya sering mengadakan latihan militer bersama dengan berbagai program seperti “Kekar Malindo”, “Malindojaya”, atau “Elang Malindo”, maka sejak krisis moneter dan ekonomi yang melanda kawasan ini, bentuk nyata dari kerjasama keamanan ini seolah tak tidak terdengar lagi. Situasi dan kondisi yang terjadi justru seolah ada pertentangan dan perbedaan mengenai konsepsi keamanan di Asia Tenggara, misalnya beberapa hal yang dapat dicatat:

- Malaysia memutakhirkan perlengkapan militernya, baik untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara maupun laut (kapal selam), yang bagi Indonesia anggaran tersebut terlalu spektakuler (364 Juta US\$), di tengah krisis ekonomi yang melanda kawasan. Berbagai kalangan jadi mempertanyakan keberadaannya – siapa ancaman paling potensial bagi Malaysia? Apakah Malaysia khawatir dengan perkembangan reformasi di Indonesia?
- Ikut sertanya Malaysia dalam pertemuan menteri pertahanan 23 negara untuk membicarakan isu-isu keamanan di Asia Tenggara, tanpa mengundang pihak Indonesia. Sebenarnya ini adalah kekhawatiran negara-negara tetangga Indonesia akan dampak keamanan di Asia Tenggara pasca bergulirnya reformasi di Indonesia. Apalagi pengaruhnya begitu kuat di Malaysia sehubungan dengan gelombang oposisi yang digulirkan oleh Mantan Wakil PM, Anwar Ibrahim.
- Dalam kerangka FPDA (*Five Powers Defense Agreement*) yang sebenarnya sudah tidak diaktifkan lagi, Malaysia dan empat negara partisipan lainnya (Singapura,

Inggris, Australia, dan Selandia Baru) mengadakan pembahasan situasi Indonesia. Padahal FPDA dulu dibentuk untuk menghadapi Indonesia di masa konfrontasi. Dalam hal ini, perlukah pakta ini dipertahankan, sementara Malaysia dan Indonesia adalah anggota ASEAN, yang mengingkari hadirnya militer asing di kawasan?

Pergantian Kepemimpinan

Dewasa ini Malaysia dan Indonesia tengah menghadapi perubahan internal yang signifikan. Malaysia sudah berganti pimpinan Nasional di bawah PM Abdullah Ahmad Badawi, sementara Indonesia sedang menghadapi Pemilu putaran akhir untuk menentukan Presiden barunya. Untuk sementara, Susilo Bambang Yudhoyono unggul untuk jabatan RI-1, yang belum terlihat adanya komitmen dan pemikiran beliau yang muncul berkait dengan isu-isu keamanan eksternal. Tetapi yang jelas, SBY berlatar belakang militer. Dari perspektif ini, Malaysia akan kembali bertetangga dengan “*Big Brother*” yang berlatar belakang militer. Tentunya sangat menarik untuk didiskusikan mengenai arah dan kecenderungan hubungan kedua negara dari perspektif masa depan ini.

Untuk kembali menegaskan hubungan keamanan kedua negara, perlu dilihat adanya beberapa persamaan perspektif, antara lain:

- Dalam ASEAN, kedua negara sudah sejak lama saling memahami keamanan Asia Tenggara dimana kehadiran militer asing tidak dianjurkan, tetapi merupakan kebijakan dalam negeri masing-masing anggotanya. Akan tetapi Malaysia dan Indonesia sama-sama tidak pernah dipergunakan sebagai pangkalan militer asing.
- Melalui konsepsi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*) Indonesia dan Malaysia sama-sama memperjuangkan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas dan netral yang antara lain memperjuangkan kawasan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir (*South East Asian Nuclear Weapon Free Zones = SEANWFZ*)
- Dalam ARF (*ASEAN Regional Forum*) Malaysia dan RI duduk sebagai anggotanya dan memiliki kesamaan pandang, misalnya dalam isu Myanmar, dimana Indonesia dan Malaysia sama-sama menekan pemerintah Yangoon untuk segera membebaskan tokoh demokrat Aung San Suu Kyi.
- Menghadapi terorisme internasional yang hadir di kawasan ini, Indonesia dan Malaysia (juga Filipina) sepakat untuk menjaga keamanan bersama dengan menyepakati Pakta Anti-Teroris pada 6 Mei 2002.
- Menghadapi isu kontemporer di Selat Malaka, kedua negara sepakat untuk menolak kehadiran pihak asing (terutama AS) untuk turut mengamankan dan bermain di halaman Indonesia dan Malaysia, tetapi lebih mengutamakan kerjasama keamanan kedua negara yang secara tradisional telah terjalin.

Kebijakan PM Abdullah Ahmad Badawi

Sebenarnya tidak ada yang signifikan dalam isu perubahan kepemimpinan di Malaysia. Kebijakan Malaysia masih tetap seperti era mahathir. Badawi kelihatannya lebih *low profile* dalam membina hubungan dengan Indonesia. Isu-isu yang melingkupi hubungan Kuala Lumpur dan Jakarta masih berkisar di seputar buruh migran atau TKI/TKW. Ada masalah-masalah baru yang disebabkan karena kedekatan perbatasan dua negara ini, seperti pencurian kayu atau isu asap. Namun kedua belah pihak berupaya untuk saling menghargai posisi masing-masing.

Ada masalah yang sedikit mengganjal hubungan keduanya yang cukup sensitif, yaitu keberadaan pengungsi aceh di Malaysia. Ketika Badawi masih sebagai Wakil PM pernah menyatakan bahwapengungsi Aceh akan diberikan izin tinggal, dengan alasan Malaysia harus memberi perhatian serius pada para pencari suaka. Ini merupakan revisi kebijakan yang tadinya akan mendeportasikan warga pengungsi itu. Mereka datang secara illegal, tetapi mendapat “perlindungan” Malaysia, seperti halnya pendatang dari Filipina Selatan, Thailand, dan Myanmar. Pemerintah Indonesia telah meminta Malaysia untuk menolak pencari suaka dari Aceh.

Kelihatannya sejauh ini isu Aceh belum mengganggu hubungan kedua negara, namun dalam konteks lebih jauh justru ada kesepakatan yang lebih menjamin kedua negara bekerjasama di bidang keamanan. Ketika kunjungan Badawi ke Jakarta di awal kepemimpinannya, dengan Megawati dicapai kesepakatan untuk “memantapkan tekad bersama untuk bekerjasama dalam memerangi terorisme internasional”. Bentuk konkritnya adalah dengan saling memberi informasi intelijen dan mencegah upaya penyelundupan senjata, serta menindaklanjuti kerjasama regional lainnya yang telah disepakati bersama. Sedangkan masalah keamanan yang perlu ditangani bersama adalah masalah perbatasan kedua negara dan penanggulangan perompakan di perairan Malaysia dan Indonesia.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan perlunya diadakan kerjasama yang lebih intensif antara kedua negara di bidang keamanan, baik secara bilateral maupun multilateral. Latihan militer semacam ELANG MALINDO adalah bukti kedua negara memiliki komitmen bersama untuk mengamankan kawasannya. Perubahan kepemimpinan di Malaysia setidaknya dapat mereduksi persaingan kepemimpinan di kawasan. Masalah-masalah yang mengganjal hubungan bilateral masih dapat diselesaikan dengan “*political will*” siapa pun yang menjadi pimpinan di kedua negara. Persaingan kepemimpinan tidak muncul lagi, tetapi diacukan pada kerjasama untuk menghadapi ancaman “kehadiran” pihak asing dan pengamanan wilayah yang rawan tindak kejahatan seperti di Selat Malaka.